

Pelanggaran Etika dalam Proyek Pembangunan Dermaga di Pantai Mutiara, Jakarta Utara

by Danang Dwi Sukmo Aji

Submission date: 12-Jul-2024 04:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 2415637952

File name: MARS_Vol_2_no_4_Agust_2024_hal_47-55.pdf (1.13M)

Word count: 3032

Character count: 20639



Pelanggaran Etika dalam Proyek Pembangunan Dermaga di Pantai Mutiara, Jakarta Utara

Danang Dwi Sukmo Aji¹, Edison H Manurung²
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mpu Tantar, Indonesia

Email Koresponden: dwiadah98@gmail.com

Abstract. Infrastructure development in urban areas is often faced with various challenges, including ethical issues. The jetty construction project at Pantai Mutiara in Block SB Number 15 A, North Jakarta, is one prominent example in this regard. The jetty, designed to support maritime and tourism activities, has, since its inception, presented a range of issues related to ethical violations. These include manipulation of permits, misuse of funds, disregard for environmental impacts, and exploitation of labour. The ethical violations in this project not only harmed the environment and surrounding communities, but also undermined public trust in the government and related agencies. This case shows how important integrity, transparency and responsibility are in every stage of development. Through this study, we will take an in-depth look at the various aspects of the ethical violations that occurred in the jetty construction project at Pantai Mutiara, including the causes, impacts, and efforts that can be made to prevent similar occurrences in the future. By identifying and understanding the ethical breaches that occurred, it is hoped that valuable lessons can be learnt that can be applied to other development projects in Indonesia. Ultimately, the aim of this paper is to provide constructive recommendations to improve the planning and implementation process of infrastructure projects, so as to achieve a balance between development progress and the ethical principles that must be upheld.

Keywords: Ethical Violations, Pier

Abstrak. Pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk persoalan etika. Proyek pembangunan dermaga di Pantai Mutiara di Blok SB Nomor 15 A, Jakarta Utara, adalah salah satu contoh yang menonjol dalam hal ini. Dermaga yang dirancang untuk mendukung aktivitas maritim dan pariwisata ini, sejak awal perencanaannya, telah menghadirkan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan pelanggaran etika. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mencakup manipulasi perizinan, penyalahgunaan anggaran, ketidakpedulian terhadap dampak lingkungan, serta eksploitasi tenaga kerja. Pelanggaran etika dalam proyek ini tidak hanya merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan instansi terkait. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap tahapan pembangunan. Melalui kajian ini, kita akan mengulas secara mendalam berbagai aspek pelanggaran etika yang terjadi dalam proyek pembangunan dermaga di Pantai Mutiara, termasuk penyebab, dampak, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dengan mengidentifikasi dan memahami pelanggaran etika yang terjadi, diharapkan dapat diperoleh pelajaran berharga yang bisa diterapkan dalam proyek-proyek pembangunan lainnya di Indonesia. Pada akhirnya, tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, sehingga dapat mencapai keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan prinsip-prinsip etika yang harus dijunjung tinggi.

Kata Kunci: Pelanggaran Etika, Dermaga

1. PENDAHULUAN

Pembangunan dermaga di Pantai Mutiara di Blok SB Nomor 15 A, Jakarta Utara merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan infrastruktur maritim dan mendukung aktivitas pariwisata di kawasan pesisir ibu kota. Dermaga ini direncanakan untuk menjadi salah satu fasilitas utama yang memfasilitasi kegiatan pelayaran, perdagangan, serta wisata bahari. Dengan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas maritim yang memadai, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal dan nasional. Namun,

sejak dimulainya proyek ini, muncul berbagai isu yang mengindikasikan adanya pelanggaran etika dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Beberapa pelanggaran tersebut meliputi manipulasi perizinan, penyelewengan anggaran, ketidakpedulian terhadap dampak lingkungan, dan eksploitasi tenaga kerja. Manipulasi perizinan sering kali melibatkan praktik korupsi dan kolusi, di mana izin pembangunan diperoleh tanpa memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Penyelewengan anggaran mengakibatkan inefisiensi penggunaan dana publik dan potensi kerugian ekonomi yang besar.

Selain itu, kurangnya perhatian terhadap analisis dampak lingkungan (AMDAL) telah menimbulkan kerusakan ekosistem pesisir, merusak habitat laut, dan ²² mengancam keberlanjutan lingkungan. Eksploitasi tenaga kerja, yang sering kali melibatkan ²² upah rendah dan kondisi kerja yang tidak aman, juga mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak-hak pekerja dan etika profesional. Kasus pelanggaran etika dalam proyek pembangunan dermaga di Pantai Mutiara mencerminkan masalah yang lebih luas dalam manajemen proyek infrastruktur di Indonesia. Hal ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip etika ¹³ dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Tanpa integritas, transparansi, dan akuntabilitas, proyek pembangunan berisiko menimbulkan dampak negatif yang jauh lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.

Makalah ini akan mengkaji berbagai aspek pelanggaran etika yang terjadi dalam proyek pembangunan dermaga di Pantai Mutiara, termasuk penyebab, dampak, ⁹ dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan, sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

¹⁹ Adapun rumusan masalah dalam riset ini adalah bagaimana pelanggaran etika terjadi dalam proses perizinan proyek pembangunan dermaga di Pantai Mutiara, Jakarta Utara?. Sejauh mana ketidakpedulian terhadap analisis dampak lingkungan (AMDAL) mempengaruhi ekosistem pesisir Pantai Mutiara?. Mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pelanggaran etika terjadi dalam proses perizinan proyek pembangunan dermaga di Pantai Mutiara, Jakarta Utara serta langkah apa yang dapat diambil untuk mengatasi dan mencegah pelanggaran etika dalam proyek pembangunan di masa depan?.

¹⁰ 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami pelanggaran etika yang terjadi dalam proyek pembangunan dermaga di Pantai

Mutiara, Jakarta Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang mendalam dan kaya akan konteks sosial serta budaya yang melingkupi masalah yang diteliti. Jenis ¹¹ penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai pelanggaran etika dalam konteks spesifik proyek pembangunan dermaga. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat menganalisis berbagai aspek dan dinamika yang terjadi di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran etika tersebut.

Penelitian dilakukan di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, yang merupakan kawasan elit dengan perumahan mewah dan fasilitas rekreasi yang lengkap. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat dari proyek pembangunan dermaga yang sedang berlangsung dan memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Dermaga ini direncanakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas bagi penghuni dan pengunjung kawasan tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat mendapatkan data yang beragam dan mendalam mengenai pelanggaran etika yang terjadi. Pantai Mutiara terletak di daerah pesisir Jakarta Utara, yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kawasan ini dikenal sebagai area perumahan elit dengan marina pribadi, pusat perbelanjaan, dan fasilitas olahraga air. Proyek pembangunan dermaga di kawasan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengembang, kontraktor, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Kompleksitas dan keberagaman stakeholder ini memberikan konteks yang kaya untuk mempelajari pelanggaran etika dalam proyek konstruksi. ⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen dengan penjelasan berikut:

- Wawancara Mendalam : Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai pelanggaran etika yang terjadi. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik-topik penting secara lebih mendalam.
- Observasi Partisipatif : Peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan di lapangan untuk mengamati proses pembangunan dermaga dan interaksi antar pemangku kepentingan. Observasi ini membantu peneliti memahami konteks sosial dan budaya yang melingkupi proyek.
- Analisis Dokumen : Peneliti menganalisis berbagai dokumen terkait proyek, termasuk laporan proyek, kontrak kerja, dan regulasi yang berlaku. Analisis dokumen ini membantu dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran etika dari aspek administratif dan hukum.

Penelitian ini didasarkan pada berbagai penelitian terdahulu yang telah mengkaji pelanggaran etika dalam proyek pembangunan. Misalnya, penelitian oleh Smith dan Jones (2015) yang mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran etika dalam proyek konstruksi di Inggris, serta studi oleh Wang et al. (2017) yang meneliti dampak pelanggaran etika terhadap keberhasilan proyek konstruksi di Tiongkok. Hasil-hasil penelitian tersebut memberikan landasan teoritis dan metodologis yang kuat bagi penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Pelanggaran Etika

a. Manipulasi Perizinan

Banyak laporan mengindikasikan bahwa izin pembangunan dermaga dikeluarkan tanpa melalui prosedur yang benar. Beberapa izin diduga diperoleh melalui suap dan kolusi antara pengembang dan oknum pejabat. Hal ini tidak hanya melanggar etika administratif, tetapi juga merusak integritas lembaga pemerintahan.

b. Penyelewengan Anggaran

Penyelidikan lebih lanjut mengungkap adanya penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dialihkan untuk keuntungan pribadi sejumlah oknum. Praktik ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

c. Ketidakpedulian Terhadap Dampak Lingkungan

Pembangunan dermaga dilakukan tanpa mempertimbangkan analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang memadai. Akibatnya, proyek ini mengancam ekosistem pantai dan kehidupan biota laut setempat. Pengabaian terhadap aspek lingkungan menunjukkan kurangnya tanggung jawab etis terhadap kelestarian alam.

d. Eksploitasi Tenaga Kerja

Dalam proses pembangunan, ditemukan banyak tenaga kerja yang dipekerjakan dengan upah di bawah standar dan tanpa perlindungan keselamatan yang memadai. Eksploitasi ini menyalahi etika profesional dan hak asasi manusia para pekerja.

Faktor Penyebab Pelanggaran Etika

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran etika dalam proyek ini meliputi:

a. Tekanan Waktu dan Biaya

Tekanan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan dengan biaya minimal seringkali mendorong kontraktor dan pekerja untuk mengabaikan standar etika.

- Tekanan dari Pemberi Tugas

Pemberi tugas atau klien sering memberikan tekanan pada kontraktor untuk menyelesaikan proyek dalam waktu singkat dan dengan biaya minimal. Hal ini mendorong kontraktor untuk mencari cara-cara cepat dan murah yang seringkali melanggar standar etika dan kualitas

- Jadwal yang Tidak Realistis

Penetapan jadwal yang tidak realistis oleh manajemen proyek juga menjadi faktor penyebab. Ketika ¹⁶ waktu yang diberikan tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, pekerja cenderung mengabaikan prosedur yang tepat dan mengambil jalan pintas

- Anggaran yang tidak memadai

Anggaran yang terbatas memaksa kontraktor untuk melakukan penghematan biaya yang berlebihan, seringkali dengan cara mengurangi kualitas material atau tidak membayar pekerja dengan adil. Ketidakcukupan dana membuat kontraktor memilih cara yang tidak etis untuk menyelesaikan proyek.

b. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan yang kurang efektif dari pihak berwenang menyebabkan pelanggaran etika sulit terdeteksi dan terkoreksi. 1) Pengawasan pemerintah yang lemah artinya pengawasan dari pemerintah yang lemah dan kurangnya inspeksi rutin memungkinkan pelanggaran etika terjadi tanpa deteksi. Keterbatasan sumber daya dan korupsi dalam badan pengawas memperburuk situasi ini. 2) Pengawasan Internal yang Tidak Efektif dimana banyak perusahaan konstruksi tidak memiliki sistem pengawasan internal yang efektif. Kurangnya pengendalian internal memungkinkan praktek tidak etis terjadi tanpa sanksi atau perbaikan yang memadai. 3) Ketidakjelasan standar pengawasan dimana standar dan prosedur pengawasan yang tidak jelas atau tidak diterapkan dengan konsisten juga menjadi masalah. Ketidakjelasan ini memberikan celah bagi pelaku proyek untuk mengabaikan aturan dan menjalankan praktek yang tidak etis.

c. Budaya Korupsi

Budaya korupsi yang masih mengakar dalam industri konstruksi di Indonesia mempengaruhi perilaku etis para pemangku kepentingan. 1) Praktik suap dan gratifikasi dimana budaya korupsi yang mengakar dalam industri konstruksi, termasuk praktik suap dan gratifikasi, membuat pelanggaran etika menjadi hal yang biasa. Banyak kontraktor dan pejabat pemerintah terlibat dalam praktik-praktik ini untuk mempercepat proses dan mendapatkan

keuntungan pribadi. 2) Kurangnya integritas dikalangan pemangku kepentingan karena kurangnya integritas dan moralitas di kalangan pemangku kepentingan proyek, baik dari pihak pemerintah, kontraktor, maupun pekerja, mendorong terjadinya pelanggaran etika. Nilai-nilai etis seringkali dikesampingkan demi keuntungan finansial. 3) Tekanan sosial dan ekonomi dimana tekanan sosial dan ekonomi, seperti kebutuhan untuk memenuhi target keuangan pribadi atau perusahaan, juga mendorong perilaku koruptif. Banyak individu yang merasa perlu untuk terlibat dalam praktek korupsi untuk bertahan atau berkembang dalam industri.

d. Ketidakadilan dalam Pembayaran dan Kesejahteraan Pekerja

Pekerja seringkali menerima upah yang jauh di bawah standar yang telah ditetapkan. Ketidakadilan dalam pembayaran ini mendorong pekerja untuk melakukan praktik yang tidak etis, seperti mencuri material atau mengurangi kualitas kerja. Pelanggaran etika dalam penelitian ini bisa juga dikarenakan kondisi kerja yang tidak memadai, seperti kurangnya fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, mempengaruhi moral dan etika pekerja. Pekerja yang merasa tidak diperlakukan dengan adil cenderung tidak peduli dengan standar etika dalam pekerjaannya. Selain itu ketidakpastian tentang masa depan pekerjaan membuat pekerja lebih rentan terhadap pelanggaran etika. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan mendorong mereka untuk mematuhi perintah atasan meskipun melanggar standar etika.

e. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Etika

Kurangnya pendidikan dan kesadaran etika dalam proyek pembangunan dermaga di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, ²¹ merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap pelanggaran etika. Beberapa aspek yang dapat diidentifikasi meliputi:

- Pelatihan Etika yang Tidak Memadai

Kurangnya pelatihan dan pendidikan mengenai etika profesional di kalangan kontraktor dan pekerja konstruksi membuat mereka kurang menyadari pentingnya mematuhi standar etika. Dan juga rendahnya kepedulian terhadap etika dalam budaya kerja di banyak perusahaan konstruksi membuat praktek tidak etis menjadi hal yang lazim. Kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya etika perlu ditingkatkan melalui berbagai program dan inisiatif.

- Minimnya Sosialisasi Aturan dan Standar Etika

Banyak pekerja dan kontraktor tidak menerima informasi yang memadai tentang aturan dan standar etika yang berlaku dalam industri konstruksi. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan dan standar etika yang berlaku dalam industri konstruksi membuat banyak pelaku proyek tidak mengetahui atau memahami kewajiban etis mereka. Panduan etika yang jelas dan terperinci juga seringkali tidak tersedia atau tidak didistribusikan secara efektif kepada semua

pemangku kepentingan. Tanpa panduan yang jelas, pelaku proyek kesulitan untuk mengetahui dan mematuhi standar etika yang diharapkan.

f. Rendahnya Kepedulian Terhadap Etika

Banyak perusahaan konstruksi memiliki budaya kerja yang tidak menekankan pentingnya etika. Nilai-nilai etis seringkali dianggap tidak relevan atau tidak prioritas dibandingkan dengan target finansial dan operasional. Sering kali hal tersebut terjadi dikarenakan pimpinan dan manajemen perusahaan seringkali tidak memberikan teladan yang baik dalam hal etika. Ketika pimpinan sendiri tidak mematuhi standar etika, sulit bagi pekerja untuk merasa terikat dengan nilai-nilai etis tersebut. Dan juga sistem insentif dalam perusahaan seringkali lebih berfokus pada hasil jangka pendek daripada perilaku etis. Pekerja yang berhasil mencapai target tanpa mempedulikan cara yang digunakan cenderung mendapatkan penghargaan, sementara perilaku etis tidak diberikan penghargaan yang setimpal.

Dampak Pelanggaran Etika

a. Kerusakan Lingkungan

Proyek dermaga telah menyebabkan degradasi ekosistem pesisir, termasuk kerusakan terumbu karang dan habitat ikan. Dampak ini memperburuk kualitas lingkungan hidup di sekitar Pantai Mutiara. Proyek pembangunan dermaga yang tidak mematuhi standar lingkungan dapat merusak ekosistem laut di Pantai Mutiara. Penggunaan metode konstruksi yang tidak ramah lingkungan, seperti pengerukan berlebihan dan pembuangan material konstruksi ke laut, dapat merusak terumbu karang, menghancurkan habitat ikan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Hal ini berdampak pada habitat satwa liar yang kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan, sehingga mengurangi keanekaragaman hayati di kawasan tersebut.

b. Kehilangan Kepercayaan Publik

Pelanggaran etika yang terjadi telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pengembang proyek. Masyarakat menjadi skeptis terhadap proyek-proyek pembangunan lainnya. Pemangku kepentingan seperti pemerintah, investor, dan organisasi non-pemerintah (NGO) mungkin menarik dukungan mereka terhadap proyek yang terbukti melanggar etika. Hilangnya dukungan ini dapat menghambat kelangsungan proyek dan mengurangi peluang kerjasama di masa depan.

Dan reputasi perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran etika ini akan tercoreng di mata publik. Reputasi yang buruk membuat perusahaan sulit mendapatkan proyek baru dan

membangun hubungan bisnis yang sehat. Hal ini juga mempengaruhi moral karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut.

c. Kerugian Ekonomi

Penyelewengan anggaran dan manipulasi perizinan berdampak pada inefisiensi penggunaan dana publik. Ini mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara dan mengurangi potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari proyek tersebut.

Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu

a. Kesamaan Temuan

¹⁷ Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Smith dan Jones (2015) yang mengidentifikasi bahwa tekanan waktu dan biaya serta kurangnya pengawasan merupakan faktor utama penyebab pelanggaran etika dalam proyek konstruksi. Selain itu, studi ini juga mendukung hasil penelitian Wang et al. (2017) yang menemukan bahwa pelanggaran etika berdampak negatif terhadap keberhasilan proyek konstruksi.

b. Perbedaan Temuan

Namun, penelitian ini menemukan beberapa aspek yang belum diungkap dalam penelitian terdahulu, seperti dampak spesifik pelanggaran etika terhadap hubungan antara pengembang dan masyarakat sekitar. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya faktor budaya dalam memahami pelanggaran etika dalam konteks lokal di Indonesia.

Upaya Penyelesaian

¹⁵ Pemerintah harus menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran etika ini. Proses hukum yang transparan dan adil harus dijalankan untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik. Kemudian sistem perizinan harus diperbaiki agar lebih transparan dan bebas dari korupsi. Pengawasan yang ketat dan penggunaan teknologi informasi dapat membantu meminimalisir potensi kecurangan. Upaya rehabilitasi lingkungan harus segera dilakukan untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Kerjasama dengan lembaga lingkungan dan komunitas lokal diperlukan untuk memastikan keberhasilan program pemulihan ini. Regulasi ketenagakerjaan harus ditegakkan dengan ketat, memastikan bahwa semua pekerja mendapatkan hak mereka sesuai dengan standar yang berlaku. Pengawasan rutin dan pelatihan bagi pengembang dan kontraktor tentang etika kerja juga diperlukan.

4. KESIMPULAN

Proyek pembangunan dermaga di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, menjadi contoh nyata dari bagaimana pelanggaran etika dapat merusak integritas proyek pembangunan. ²⁴ Penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan untuk mematuhi prinsip-prinsip etika, menjaga transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak.

5. DAFTAR PUSTAKA

Antara News. (2022). Kontroversi pembangunan dermaga di Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Diakses dari: Antara News.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2020). Laporan Tahunan Pembangunan Infrastruktur Nasional.

Jakarta Post. (2022). Labor exploitation in Jakarta's infrastructure projects. Diakses dari: Jakarta Post.

¹⁸ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2021). Laporan pelaksanaan proyek pembangunan dermaga Pantai Mutiara.

Kompas. (2022). Dampak lingkungan dari proyek dermaga Pantai Mutiara. Diakses dari: Kompas.

Laporan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. (2022). Hasil audit proyek infrastruktur maritim.

⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.

Smith, J., & Jones, L. (2015). Ethical violations in construction projects: Causes and implications. *Journal of Construction Management*, 35(2), 123-135.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Wang, Y., ²⁵ Li, X., & Zhang, Z. (2017). Impact of ethical violations on construction project success in China. *International Journal of Project Management*, 36(3), 255-267.

Pelanggaran Etika dalam Proyek Pembangunan Dermaga di Pantai Mutiara, Jakarta Utara

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.artei.or.id

Internet Source

1%

2

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

1%

3

repository.its.ac.id

Internet Source

1%

4

repository.staidaf.ac.id

Internet Source

<1%

5

text-id.123dok.com

Internet Source

<1%

6

www.ejournal.ust.ac.id

Internet Source

<1%

7

www.researchgate.net

Internet Source

<1%

8

www.windsorchapel.org

Internet Source

<1%

9

allohmahabesar88.wordpress.com

Internet Source

<1%

10	eproceeding.bbg.ac.id Internet Source	<1 %
11	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
12	pdffox.com Internet Source	<1 %
13	es.scribd.com Internet Source	<1 %
14	journal.stmikjayakarta.ac.id Internet Source	<1 %
15	mimbarmasjid.tripod.com Internet Source	<1 %
16	www.studilmu.com Internet Source	<1 %
17	digilib.unisayogya.ac.id Internet Source	<1 %
18	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
19	komunikasi.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1 %
20	lipi.go.id Internet Source	<1 %
21	repositorii.urindo.ac.id Internet Source	<1 %

22

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

23

www.lbh-apik.or.id

Internet Source

<1 %

24

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

25

Desjardins, France. "Proposition d'un cadre systemique en soutien a l'amelioration des competences des membres des equipes projet: Le cas d'une organisation municipale a structure matricielle faible", Universite du Quebec a Chicoutimi (Canada), 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off